



# Usut Tarif Parkir Tak Wajar di Malioboro

## ■ Satpol PP Kota Yogyakarta Buka Ruang Penindakan

**YOGYA. TRIBUN** - Satpol PP Kota Yogyakarta melangsungkan proses penindakan terhadap aktivitas parkir *nuthuk* di kawasan Malioboro. Insiden penerapan tarif parkir di luar batas kewajaran terjadi di Jalan Margo Utomo, pada Jumat (18/7) malam silam. Dalam insiden yang viral di media sosial tersebut, korban dipatok tarif sebesar Rp15 ribu untuk kendaraan roda empat, tanpa disertai karcis resmi yang dikeluarkan oleh pihak Pemkot Yogyakarta.

Merespons kejadian itu, Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Dodi Kurnianto, mengaku sudah berkoordinasi dengan jajaran Dinas Perhubungan (Dishub).

Proses penyelidikan pun tengah digulirkan aparat penegak Peraturan Daerah (Perda). "Kami akan melakukan penindakan. Tapi, kami tidak bisa bicarakan waktunya. Sekarang kami selidiki dulu. Dalam waktu dekat kami akan operasi," tandasnya, saat dikonfirmasi, Senin (21/7).

Dodi pun mewanti-wanti, sanksi pidana bisa saja dikenakan, jikalau ditemukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan aktivitas perparkiran.

Menurutnya, rangkaian sanksi sudah tercantum di dalam Perda Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2019, yang mengatur tentang perparkiran.

"Di Perda ada (konsekuensi)

### TANPA KARCIS RESMI

- Penerapan tarif parkir di luar batas kewajaran terjadi di Jalan Margo Utomo, Jumat (18/7).
- Korban dipatok tarif Rp15 ribu untuk kendaraan roda empat, tanpa disertai karcis resmi.
- Proses penyelidikan pun tengah digulirkan aparat penegak Peraturan Daerah (Perda).
- Sanksi pidana bisa dikenakan jika ada pelanggaran penyelenggaraan aktivitas perparkiran.

memang terbukti melakukan pelanggaran, baik parkir *nuthuk*, parkir di luar ketentuan, atau liar, bisa dikenakan sanksi sesuai di Perda," tegasnya.

Kepala Dishub Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho menandakan, tarif parkir roda empat di Jalan Margo Utomo sesuai aturan hanya Rp5 ribu.

Ia pun menyebut, karcis yang disodorkan juru parkir (jukir) kepada korban *nuthuk* tersebut bukan karcis resmi yang dikeluarkan Pemkot Yogyakarta.

"Itu bukan karcis resmi, bukan dikeluarkan Pemkot. Sudah disampaikan ke teman-teman kepolisian, (masuk) proses lidik," tegasnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Seno Basoro menuturkan, kasus parkir *nuthuk* yang kembali terjadi di kawasan Malioboro tempo hari jelas sangat memprihatinkan.

Menurutnya, Dinas Perhubungan (Dishub) dan instansi terkait lainnya, tidak boleh mem-

larut-larut dan terus berulang.

"Juru parkir yang tidak sesuai aturan seperti itu jangan dibiarkan, karena akan merusak citra Kota Yogya sebagai daerah tujuan pariwisata," katanya, Senin (21/7).

Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut mengatakan, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan Dishub untuk para jukir sejatinya tidak kurang-kurang.

Namun, untuk menunjang pengawasan dan patroli di lapangan, Seno menyebut, sejauh ini masih dibutuhkan tambahan personel.

"Personelnya terbatas. Panjang jalan yang harus diawasi belum linier dengan (jumlah) personel Dishub. Butuh penambahan personel untuk pengawasan layanan parkir di Kota Yogya," tandasnya.

"Patroli sudah, pengawasan sudah, tapi personelnya terbatas. Makanya, di 2026 nanti perlu tambahan personel di lapangan. Sekarang masih ada keterbatasan untuk operasi atau patroli itu,"

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005